KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Usulkan Evaluasi AIPA
Tanggal : Kamis, 20 Juli 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

DPR Usulkan Evaluasi AIPA

FOTO: SINGGIH WIRYONO /REPUBLIKA

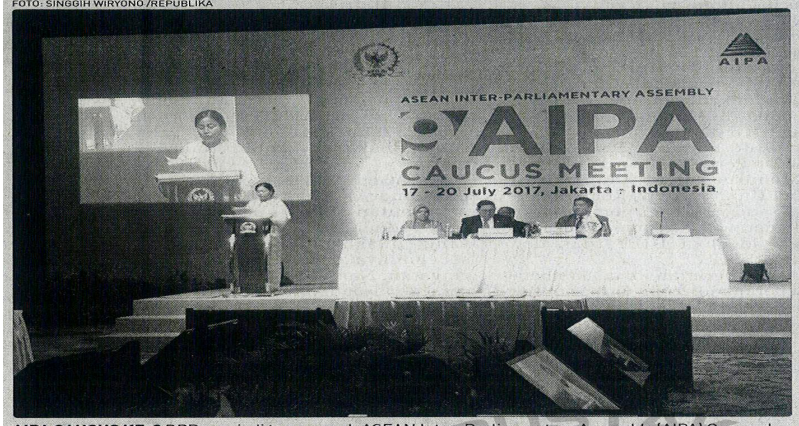

AIPA CAUCUS KE-9 DPR menjadi tuan rumah ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-9. Acara ini berlangsung mulai 17-20 Juli 2017 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-9. Acara ini akan berlangsung selama empat hari, mulai 17 hingga 20 Juli 2017 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta.

Pada sidang tersebut DPR RI mengusulkan evaluasi ulang institusi ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA). Usulan ini diharapkan akan dapat lebih merespons aspirasi - aspirasi warga negara ASEAN yang semakin dinamis.

"Inilah saatnya untuk memulai diskusi untuk meninjau, menilai, mengevaluasi ulang institusi AIPA, sehingga kita dapat lebih mencerminkan dan merespons aspirasi warga negara ASEAN yang semkin dinamis," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menyampaikan sambutan pada Sidang AIPA Caucus ke-9 di Jakarta, Selasa (18/7).

Politisi Fraksi Gerindra itu mengatakan, penyelenggaraan AIPA ke-9 sudah tepat waktu, Pasalnya pada tahun ini, ASEAN memperingati 50 tahun berdirinya ASEAN. "Selain itu, AIPA juga akan menjalani empat dasawarsa perjalanannya tahun ini, karena itu, seiring bertambahnya usia AIPA, perlu dilakukan re-evaluasi kelembagaan di tubuh AIPA," imbuhnya.

Fadli menambahkan, Indonesia mengapresiasi kerja sama AIPA dengan lembaga internasional lainnya, termasuk kerja sama yang diselenggarakan oleh AIPA dan ASEAN *Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN) yang meminta pertimbangan terkait regulasi Konvensi Perdagangan International Species Langka (CITES).

"Kami percaya bahwa sidang istimewa ini dapat menyusun suatu visi mengenai arah masa depan AIPA, serta rencana pengembangannya," ujarnya.

Berbagai isu penting

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar - Parlemen (BKSAP) DPR Juliari Batubara mengatakan, salah satu topik utama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah masalah kelautan. Hal ini mengingat 80 persen kawasan Asia Tenggara didominasi perairan.

"Persoalan maritim ini luas, misalnya illegal fishing dan teritorial dispute antara negara ASEAN maupun negara non-ASEAN. Isu-isu ini yang akan kita bahas di AIPA *Caucus meeting*," ungkapnya.

Topik lainnya yang akan dibahas dalam Sidang AIPA, di antaranya upaya tindak tegas negara terhadap kejahatan manusia terhadap satwa liar. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Syaifullah Tamliha menilai, pertemuan ini sangat penting guna mendiskusikan isu satwa liar di masing-masing negara.

"Pertemun ini amat penting dalam rangka mendiskusikan peran dan dukungan anggota parlemen di lingkup negara ASEAN. Pertemuan ini adalah juga bagian dari pelaksanaan kerja sama yang telah dilakukan bersama," ujarnya.

Disebutkan, isu tentang kejahatan manusia terhadap satwa liar menjadi pembahasan serius di tiap Negara, sehingga hal ini membutuhkan kerja sama di antara negara ASEAN untuk sama-sama memiliki komitmen untuk menindak tegas terhadap kejahatan satwa liar.

Dalam forum ini, lanjut Syaifullah, didiskusikan beberapa strategi yang ditawarkan dalam memberantas kejahatan terhadap satwa. Mengingat seringkali ditemukan banyak satwa yang mengalami kematian yang tidak saja diakibatkan oleh faktor alam, namun juga oleh ulah manusia.

Sinkronisasi pendapat antar negara sangat diperlukan dalam upaya bersama dalam mendukung sikap tegas terhadap kejahatan satwa liar. "Melalui inisiatif ini saya percaya kita bisa secara teratur memberikan keterangan terbaru dan mengkaji implementasi strategi yang mendukung pemberantasan tindak kejahatan terkait satwa liar," tegas politisi PPP ini.

Selain kerja sama maritim dan membahas masalah kejahatan terhadap satwa liar, acara yang berlangsung selama empat hari ini akan membahas penanganan konflik secara damai. Secara khusus, DPR mengundang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia era Kabinet Indonesia Bersatu, Marty Natalegawa untuk memberikan pemaparan.

Dibukanya dialog dan negosiasi terkait hal ini dinilai penting, sebagai salah satu upaya mewujudkan Goal 16 SDGs tentang *Promote Peaceful and Inclusive Societies for Sustainable Development*. Nantinya, menurut Juliari, usulan-usulan yang dihasilkan AIPA Caucus ini akan dijadikan resolusi dalam sidang AIPA *General Assembly* di Manila.

Sebagaimana diketahui, AIPA Caucus merupakan mekanisme parlemen negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memantau tindak lanjut pelaksanaan resolusi AIPA, membahas suatu isu tertentu, hingga menjadi ajang pembahasan upaya harmonisasi legislasi yang dapat memfasilitasi kerja sama regional.

Beberapa delegasi negara ASEAN yang hadir dalam AIPA Caucus Meeting ke-9 ini, antara lain: Le Quang Huy (Vietnam), Werapan Sookgont (Thailand), Gan Thiam Poh (Singapur), Viengthavisone Thephachanh (Lao PDR), Chhit Kim Yeat (Cambodia) dan Hafimi Abdul Haado (Brunei Darusallam). ●